



Pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku

The influence of the implementation of the government accounting system and internal control system on the financial management performance of the Maluku Provincial Government

Fandy Nikijuluw

Politeknik Negeri Ambon, Ambon, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah provinsi Maluku. Populasi dalam penelitian ini adalah 43 SKPD pada Pemerintah Provinsi Maluku dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah dengan metode angket (Kuesioner). Jumlah sampel yang terkumpul setelah batas waktu yang ditentukan adalah 115 dan sekaligus ini dijadikan responden pada penelitian ini. Teknik analisa yang digunakan adalah SPSS versi 22. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan laporan keuangan pemerintah, sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelola laporan keuangan pemerintah

Kata Kunci: Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern, Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah

Abstract

This study aims to examine the effect of the implementation of a government accounting system and internal control system on the financial management performance of the Maluku provincial government. The population in this study was 43 Regional Apparatus Organizations (OPD) within the Maluku Provincial Government, using purposive sampling. The primary data collection method used was a questionnaire. The sample size collected after the specified deadline was 115, and these served as respondents in this study. The analysis technique used was SPSS version 22. Based on the analysis, it can be concluded that the implementation of a government accounting system has a positive and significant effect on the performance of government financial report management. The internal control system has a positive and significant effect on the performance of government financial report management.

Keywords: Implementation of Government Accounting System, Internal Control System, Government Financial Management Performance

Histori Artikel:

Diterima 27 November 2025, Direvisi 20 Desember 2025, Disetujui 21 Desember 2025, Dipublikasi 30 Desember 2025.

***Penulis Korespondensi:**

fandynikijuluw@yahoo.com

DOI:

<https://doi.org/10.60036/jbm.972>

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah merupakan representasi wujud pelaksanaan demokrasi di daerah (Halim 2014). Oleh karena itu pemerintah daerah bertanggungjawab untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan baik dan benar dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum (Halim 2014). Tuntutan pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah sebagai penyelenggara Negara atas kepercayaan masyarakat yang diamanatkan selalu menjadi sorotan. Dengan kata lain masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang didapatkan atas pelayanan instansi pemerintah. Kondisi ini mendorong meningkatnya kebutuhan atas pengukuran kinerja pemerintah daerah sebagai pengembalian amanat rakyat

Kinerja pemerintah daerah dapat terlihat dalam salah satu aspek yakni pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terus mengalami revisi hingga terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Seyogyanya pengelolaan keuangan daerah akan bermuara pada penyajian laporan keuangan yang implikasinya berkaitan dengan kredibilitas masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan aspek-aspek penunjang diantaranya penerapan sistem akuntansi dan pengendalian intern pemerintah.

Laporan keuangan merupakan media untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangan kepada publik yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010) dijelaskan bahwa laporan yang berkualitas memenuhi karakteristik, relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Penyusunan laporan keuangan berkaitan dengan sistem akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah menurut pasal 232 ayat (3) Pemendagri No. 13 Tahun 2006, yaitu meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer

Pemerintah Provinsi Maluku dalam pengelolaan keuangannya masih harus memperbaiki kualitas dan akuntabilitas keuangan daerah, Hal ini harus dilakukan karena Berdasarkan hasil pemeriksaan dari BPK atas LKPD Provinsi Maluku tahun 2024 menemukan bahwa terdapat permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2024 serta pengelolaan keuangan daerah (press-release-provinsi 2024). Permasalahan tersebut terkait dengan pemerintah Provinsi Maluku belum sepenuhnya Menyusun Anggaran Pendapatan belanja daerah yang terukur secara rasional, realisasi belanja perjalanan dinas pada 12 OPD tidak sesuai ketentuan serta adanya permasalahan aset daerah, dimana terdapat ketidaksesuaian antara kewenangan penggunaan dan kepemilikan atau sertifikat aset serta aset tetap tidak dapat diketahui keberadaannya. Hal lain terkait dengan permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yaitu ketidaktertiban dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban kas di Bendahara Pengeluaran,

Sistem pengelolaan keuangan yang lemah di Provinsi Maluku bersumber dari pegawai yang tidak tepat dan kurang memahami prosedur pengelolaan keuangan dengan baik. Pemberian wewenang pimpinan kepada bawahan tidak berdasarkan potensi dari pegawai, uraian tugas pokok dan fungsi serta tidak menerapkan suatu bentuk pengendalian intern yang baik dan optimal dalam aktivitas entitas mereka. Pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis salah satu penyebab tidak maksimalnya pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku disebabkan oleh rendahnya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang sepenuhnya belum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, serta dalam penerapan pengelolaan keuangan, masih memiliki sumber daya manusia yang terbatas baik dari latar belakang pendidikan akuntansi maupun komitmen atasan langsung selaku pengguna anggaran.

Penelitian tentang sistem pengendalian intern telah banyak dilakukan di Indonesia. Peneliti sebelumnya Simanungkalit (2013) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian yang sama juga dilakukan oleh Maryani dan Jurnalistiatai (2025) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Mengacu pada fenomena dan didasari konsep-konsep yang ada, motivasi dari Pemerintah Provinsi Maluku harus berusaha bahwa diperlukan percepatan perbaikan dari sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah melalui langkah-langkah yang nyata. Selain itu juga melihat fungsi pengendalian intern terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada Pemerintah Provinsi Maluku.

METODE

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat penjelasan karena merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel melalui pengujian hipotesis. Data penelitian yang dibutuhkan menggunakan data primer dalam bentuk kuesioner

Populasi

Populasi penelitian adalah seluruh OPD di Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang berjumlah 43 OPD berdasarkan atas empat Peraturan Daerah antara lain :

1. Peraturan Daerah No.22 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
2. Peraturan Daerah Provinsi Maluku No.23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Maluku.
3. Peraturan Daerah Provinsi Maluku No.24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku
4. Peraturan Daerah Provinsi Maluku No.25 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga lain Provinsi Maluku.

Alasan pengambilan OPD sebagai populasi yaitu :

1. OPD merupakan lembaga pelayanan masyarakat yang senantiasa dapat melayani setiap kebutuhan masyarakat.
2. Mekanisme pencatatan yang digunakan oleh setiap OPD sama.
3. OPD merupakan suatu entitas akuntansi pemerintah daerah yang didasarkan pada pengertian bahwa pengukuran kinerja akan lebih tepat jika dilakukan atas suatu fungsi

Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan atas tujuan tertentu/orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel. Adapun kriteria yang harus dilihat yaitu :

1. Pegawai yang membidangi dan bertanggungjawab atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
2. Pertanggungjawaban yaitu staf pengelola keuangan terdiri dari pejabat penatausahaan keuangan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, pembantu bendahara dan bendahara barang.
3. Pegawai tersebut memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun dan pegawai tersebut telah mengikuti sosialisasi atau pelatihan terkait penyajian laporan keuangan.

Sebagai unit analisis adalah :

1. Kepala OPD
2. Bendahara penerimaan
3. Bendahara pengeluaran
4. Staf pengelola keuangan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu dengan menggunakan kuesioner. Daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk menggali data sesuai dengan permasalahan penelitian. Kuesioner terdiri dari dua bagian, yaitu mengenai karakteristik responden dan berisi daftar pertanyaan mengenai sistem akuntansi pemerintahan (X_1), sistem pengendalian intern (X_2) serta kinerja pengelolaan keuangan (Y). Data di lapangan diperoleh dengan cara peneliti menyediakan instrument penelitian.

Definis Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu, penerapan sistem akuntansi pemerintahan (X_1) dan sistem pengendalian intern (X_2) yang menjadi variabel independen (X) dan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang menjadi variabel dependen (Y).

1) Variabel Sistem Akuntansi pemerintah

Sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah menurut pasal 232 ayat (3) Pemendagri No. 13 Tahun 2006, yaitu meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. variabel sistem akuntansi pemerintahan diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Roviyantie (2011)

2) Pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan (PP No 60 Tahun 2008). variabel pengendalian intern diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Krismiaji (2002)

3) kinerja pengelolaan keuangan, yaitu kemampuan dari pengelola keuangan masing-masing OPD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang berpedoman dan tidak menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kinerja pegawai atau staf keuangan diukur melalui instrument kinerja yang dituangkan pada kuisisioner dikembangkan oleh warisno (2008)

Tabel 1. Definisi Operasional variabel

Varibel	Indikator	Skala ukur
Penerapan sistem Akuntansi Pemetintah (X_1)	1. Apakah Sistem Akuntansi yang diterapkan pada OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Skala Likert 5
	2. Apakah setiap transaksi keuangan pada SKPD dilakukan analisis transaksi/Identifikasi transaksi	
	3. Apakah pada OPD dilaksanakan pengidentifikasian terhadap pencatatan	
	4. Apakah setiap transaksi keuangan pada SKPD didukung oleh bukti transaksi	
	5. Apakah semua transaksi keuangan dilakukan pencatatan secara kronologis	
	6. Apakah pada OPD dilakukan pengklasifikasian terhadap transaksi yang terjadi	
	7. Apakah pada OPD dilakukan klasifikasi atau transaksi sesuai dengan pos-pos yang semestinya	

Varibel	Indikator	Skala ukur
	<ol style="list-style-type: none"> 8. Apakah pada OPD dilakukan sistem pengendalian dalam mengukur dan melaporkan pencatatan 9. Apakah pada OPD membuat laporan keuangan setiap periode akuntansi 10. Apakah pelaporan laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodic 	
Sistem Pengendalian Intern (X ₂)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan selalu menetapkan aturan mengenai perilaku dan standar etika pegawai 2. OPD telah memiliki standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi 3. Struktur organisasi OPD telah menggambarkan pembagian kewenangan dan tanggung jawab pegawai 4. Pimpinan telah memberikan wewenang kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. 5. Pimpinan OPD selalu mengambil tindakan yang tegas atas pelanggaran kebijakan, prosedur, atau aturan perilaku 6. Pimpinan OPD selalu melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi, fisik kas, dan barang. 7. Pimpinan OPD secara terus menerus melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian 8. Pimpinan telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi 9. Pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi 10. Semua transaksi yang dientri dan diproses kedalam komputer adalah seluruh transaksi yang telah diotorisasi 11. Kebijakan dan prosedur pengamanan fisik atas aset telah ditetapkan dan diimplementasikan dengan baik 12. Pengeluaran uang pada OPD selalu didokumentasikan pada bukti pengeluaran kas yang telah diberi nomor urut tercetak 13. Pegawai dan atasan telah memahami tujuan dari kegiatan pengendalian 14. Instansi Pemerintah telah mengembangkan rencana untuk identifikasi dan pengamanan aset infrastruktur 15. Peralatan dan persediaan selalu disimpan ditempat yang diamankan secara fisik dan dilindungi dari kerusakan 16. Identitas aset telah dilekatkan pada meubelair, peralatan dan inventaris kantor lainnya 17. Pengguna anggaran/pemegang kas pada masing-masing OPD telah menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat pada waktunya 18. Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan memungkinkan untuk dilakukan tindakan korektif secara tepat 	Skala Likert 5

Varibel	Indikator	Skala ukur
	19. Saluran komunikasi berkelanjutan telah dilaksanakan secara terbuka dan efektif dengan masyarakat, rekanan, dan aparat pengawas intern dalam memberikan masukan signifikan 20. Sebagai tindak lanjut dari penilaian terhadap kualitas pengendalian intern, OPD telah melakukan perbaikan pengendalian intern 21. OPD selalu menindaklanjuti setiap hasil temuan/ revidasi dan saran yang diberikan oleh BPK/Inspektorat 22. Pimpinan selalu merevisi dan mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan.	
Kinerja Pengelolaan Keuangan (Y)	1. APBD disusun dengan pendekatan kinerja 2. Pemerintah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk menandatangani persetujuan 3. Pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan 4. Pelaporan keuangan daerah dibuat dalam bentuk laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah 5. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang dicapai pemerintah 6. Laporan keuangan SKPD direview oleh Inspektorat sebelum diserahkan kepada BPK 7. Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan 8. Dilakukannya financial audit terhadap laporan keuangan daerah 9. Indikator hasil kinerja yang akan dicapai ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan APBD 10. Pengelolaan APBD dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi dan kepada masyarakat luas	Skala Likert 5

Teknik Analisa Data

Uji Validitas

Validitas merupakan data penelitian yang ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat dan akurasi. Pengukuran ini dikatakan valid jika instrument tersebut dapat mengukur konstruk sesuai dengan yang diharapkan (Indriantoro dan Supomo, 1999).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dan variabel. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten artinya bahwa uji reliabilitas adalah untuk menguji derajat kebebasan pengukuran dan kesalahan random dan akan menghasilkan bentuk yang konstan. Suatu alat ukur dikatakan reliabel jika alat ukur tersebut dapat memberikan hasil yang tetap atau sama bila variabel yang diukur tidak berubah (Supomo, 1999).

UJI Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tujuan uji Normalitas dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah model regresi memenuhi asumsi normal atau tidak (Ghozali, 2005), model regresi yang baik memiliki distribusi normal, uji normalitas dilakukan dengan uji kurva penyebaran P-Plot, yakni jika pola penyebaran memiliki garis normal maka data dapat dikatakan berdistribusi normal

Uji Multikolineritas

Multikolineritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan awalnya serta Varians Inflation Factor (VIF). Tolerance mengukur validitas variabel independen yang rendah sama dengan nilai VIP tinggi, karena $VIF = 1/tolerance$. Nilai entoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya Multikolineritas adalah nilai tolerance $< 0,10$ atau sama dengan nilai VIF >10

Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah nilai dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan metode statistik berupa uji plot.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel independen. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Niali koefisien determinan (R^2) antara nol dan satu. Menurut Ghozali (2011), jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted R^2 negatif, maka nilai adjusted R^2 dianggap berniali nol. Secara matematis jika nilai $R^2 = 1$, maka adjusted $R^2 = R^2 = 1$, sedangkan nilai $R^2 = 0$, maka adjusted $R^2 = (1-K)/(n-k)$. jika $k > 1$, maka adjusted R^2 akan bernilai negative

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Output statistika deskriptif dalam tabel dibawah ini meliputi variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern dan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah provinsi Maluku menunjukkan sampel (n) 115 responden. Untuk lebih jelasnya, hasil statistik deskriptif variabel penelitian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Statistik Deskripsi Variabel Penelitian

	Kisaran Teoritis	Kisaran Aktual	Rata-rata Total Jawaban	Rata-rata Jawaban	Deviasi Standar
Penerapan sistem akuntansi pemerintah	10-50	27-50	39,13	3.91	5.20
Sistem pengendalian intern	22-110	76-101	85.12	3.86	8.50
Kinerja Pengelolaan Keuangan	10-50	29-50	38,82	3.88	4.33

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel 1 tersebut dapat diketahui informasi tentang standar deviasi, rata-rata serta kisaran aktual dan kisaran teoritis dari masing-masing responden. Secara rinci tabel 4.3 akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama, untuk variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah diukur dengan 10 item pertanyaan. Skala pengukuran dalam variabel ini menggunakan 5 titik skala likert. Hal

ini menunjukkan bahwa kisaran teoritis pada variabel ini adalah antara 10-50. Hasil pengukuran terhadap seluruh jawaban responden menunjukkan skor aktual berada pada kisaran 27- 50 dengan skor total rata-rata 39.13 atau rata-rata jawaban responden 3,91 dan standar deviasi 5,20. Hasil ini menunjukkan bahwa standar deviasi penerapan sistem akuntansi pemerintah lebih kecil dari nilai rata-rata variabel dimaksud. Dengan demikian, simpangan data dalam penelitian ini relatif kecil, yang berarti data variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah baik.

Kedua, Selanjutnya variabel sistem pengendalian intern diukur dengan 22 item pertanyaan. Skala pengukuran menggunakan menggunakan 5 titik skala likert. Dengan demikian kisaran skor teoritis untuk variabel ini adalah 22-110. Hasil pengukuran atas seluruh jawaban responden menunjukkan skor aktual berada pada kisaran 76-101, dengan nilai total rata-rata sebesar 85.12 atau nilai rata-rata jawaban responden 3,86 dan standar deviasi sebesar 8.50. Dari data dimaksud terlihat bahwa standar deviasi variabel sistem pengendalian intern lebih kecil dari nilai rata-rata variabel tersebut. Hal ini menunjukkan simpangan data dalam penelitian ini relatif kecil dan berarti bahwa data variabel sistem pengendalian intern tergolong baik.

Ketiga, selanjutnya variabel kinerja pengelolaan keuangan daerah diukur dengan 10 item pertanyaan. Skala pengukuran menggunakan menggunakan 5 titik skala likert. Dengan demikian kisaran skor teoritis untuk variabel ini adalah 10-50. Hasil pengukuran atas seluruh jawaban responden menunjukkan skor aktual berada pada kisaran 29-50, dengan nilai rata-rata sebesar 38.82, atau nilai rata-rata jawaban responden 3,88 dan standar deviasi sebesar 4.33. Dari data dimaksud terlihat bahwa standar deviasi kinerja pengelola keuangan pemerintah lebih kecil dari nilai rata-rata variabel tersebut. Hal ini menunjukkan simpangan data dalam penelitian ini relatif kecil dan berarti bahwa data variabel kinerja pengelolaan keuangan pemerintah tergolong baik.

Pengujian Validitas Data

Uji validitas dilakukan dengan uji homogenitas data dengan uji korelasional antar skor masing-masing butir dengan skor total. Hasil uji Validitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Data

Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah					
No	Pertanyaan	Nilai Pearson Correlation	Sig	Ket	
1	PSAP 1	0.825	0,000	Valid	
2	PSAP 2	0.783	0,000	Valid	
3	PSAP 3	0.742	0,000	Valid	
4	PSAP 4	0.777	0.000	Valid	
5	PSAP 5	0.751	0.000	Valid	
6	PSAP 6	0.825	0,000	Valid	
7	PSAP 7	0.792	0.000	Valid	
8	PSAP 8	0.734	0.000	Valid	
9	PSAP 9	0.811	0,000	Valid	
10	PSAP 10	0.787	0,000	Valid	
Variabel Sistem pengendalian intern					
No	Pertanyaan	Nilai Pearson Correlation	Sig	Ket	
1	SPI 1	0,683	0,000	Valid	
2	SPI 2	0.557	0,000	Valid	
3	SPI 3	0.659	0,000	Valid	
4	SPI 4	0.653	0.000	Valid	
5	SPI 5	0,789	0.000	Valid	
6	SPI 6	0.737	0,000	Valid	

Variabel Sistem pengendalian intern

No	Pertanyaan	Nilai Pearson Correlation	Sig	Ket
7	SPI 7	0.586	0.000	Valid
8	SPI 8	0.623	0.000	Valid
9	SPI 9	0.691	0,000	Valid
10	SPI 10	0.491	0,000	Valid
11	SPI 11	0.787	0,000	Valid
12	SPI 12	0.663	0,000	Valid
13	SPI 13	0.732	0,000	Valid
14	SPI 14	0.473	0.000	Valid
15	SPI 15	0.326	0.000	Valid
16	SPI 16	0.401	0,000	Valid
17	SPI 17	0.659	0.000	Valid
18	SPI 18	0.393	0.000	Valid
19	SPI 19	0.659	0,000	Valid
20	SPI 20	0.494	0,000	Valid
21	SPI 21	0.692	0,000	Valid
22	SPI 22	0.711	0,000	Valid

Variabel Kinerja Pengelolaan keuangan Pemerintah

No	Pertanyaan	Nilai Pearson Correlation	Sig	Ket
1	KPKP 1	0.539	0.000	Valid
2	KPKP 2	0.779	0.000	Valid
3	KPKP 3	0.614	0.000	Valid
4	KPKP 4	0.731	0.000	Valid
5	KPKP 5	0.815	0.000	Valid
6	KPKP 6	0.779	0.000	Valid
7	KPKP 7	0.592	0.000	Valid
8	KPKP 8	0.614	0.000	Valid
9	KPKP 9	0.561	0.000	Valid
10	KPKP 10	0.341	0.000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah

Pengujian validitas dengan uji homogenitas data dan uji korelasional antara skor masing-masing butir dengan skor total (*Pearson Correlation*) menunjukkan korelasi yang positif diatas 0,30 dan tingkat signifikan pada level 0,000. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa pernyataan-pernyataan yang mengukur variabel Penerapan sistem akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern dan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah adalah valid.

Pengujian Reliabilitas Data

Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel, jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* >0,70 (Nunally, 1994 dalam Ghozali, 2011). Hasil uji reliabilitas untuk masing-masing variabel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Data

No	Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Ket
1	Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah	0,93	Reliabel
2	Sistem Pengendalian Intern	0,92	Reliabel

No	Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Ket
3	Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah	0,83	Reliabel

Sumber: Data primer diolah

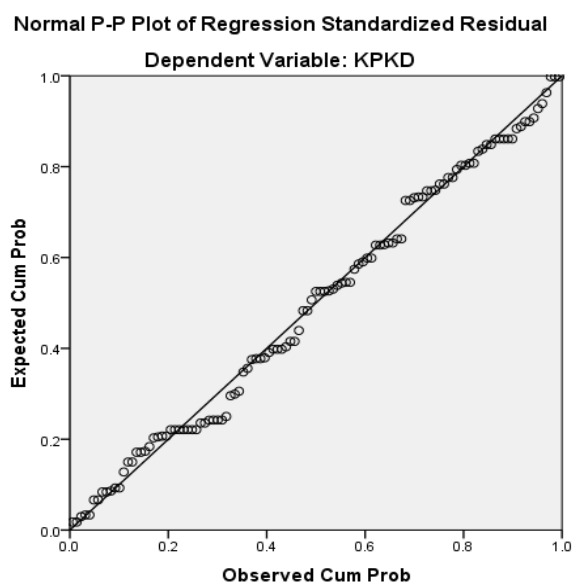
Pada uji reliabilitas, konsistensi Intern koefisien *Cronbach's Alpha* menunjukkan tidak ada koefisien yang kurang dari nilai batas minimal 0,70. Dalam hal ini, koefisien *Cronbach's Alpha* variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah sebesar 0,93 variabel sistem pengendalian intern sebesar 0,92 selanjutnya kinerja variabel pengelolaan keuangan pemerintah sebesar 0,83. Nilai *Cronbach's Alpha* variabel-variabel penelitian berada di atas batas minimal 0,70 sehingga indikator-indikator untuk masing-masing variabel dikategorikan reliabel atau handal

Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk menilai baik tidaknya model yang regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Dalam pengujian yang menggunakan analisis regresi, diperlukan adanya suatu pengujian dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya penyimpangan terhadap asumsi klasik

Hasil Pengujian Normalitas

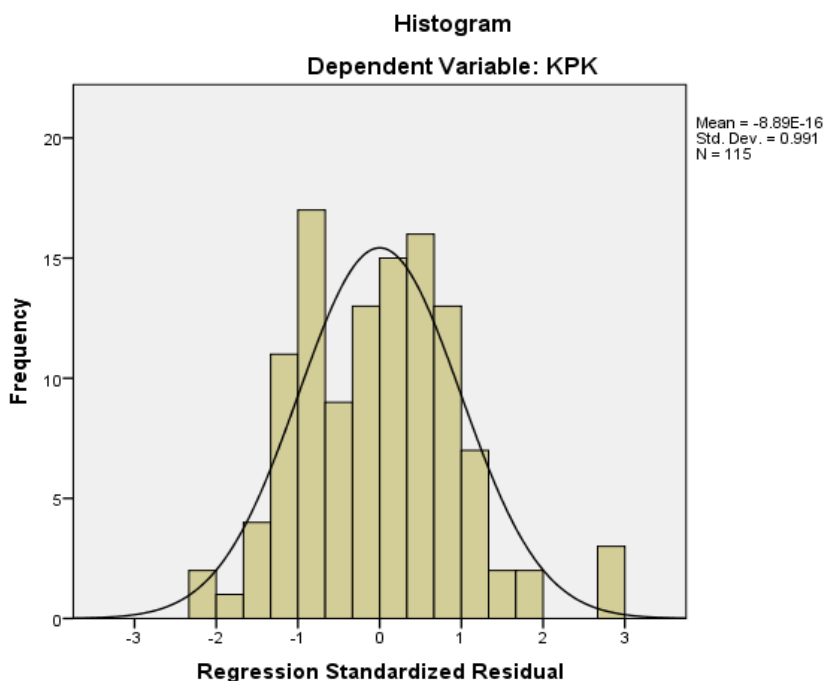
Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Uji normalitas juga dapat dilakukan dengan melihat grafik p-plot yang terlihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Uji Normalitas Grafik P-Plot

Sumber: Data primer yang diolah

Pada grafik p-plot di atas, terlihat titik-titik menyebar menghimpit disekitar garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian untuk variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern dan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah terdistribusi secara normal. uji normalitas data dengan melihat grafik histogram dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2. Uji Normalitas Grafik Histogram
Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan gambar tampilan uji normalitas pada gambar 2 menunjukkan pola yang distribusi normal, hal ini dapat dilihat dari data yang menyebar disekitar garis diagonal atau grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal dan tidak menceng kekanan atau ke kiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Pengujian Multikolonieritas

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Ada tidaknya korelasi antar variabel-variabel tersebut, dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* > 0,01 dan VIF < 10 maka dinyatakan tidak ada korelasi sempurna antara variabel independen dan sebaliknya. Hasil pengujian multikolinieritas. Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut :

Tabel 5. Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	T		Tolerance	VIF
1 (Constant)	9.762	2.488		3.92	.000		
PSAP	.344	.095	.414	3.62	.000	.283	3.53
SPI	.183	.054	.384	3.36	.001	.283	3.53

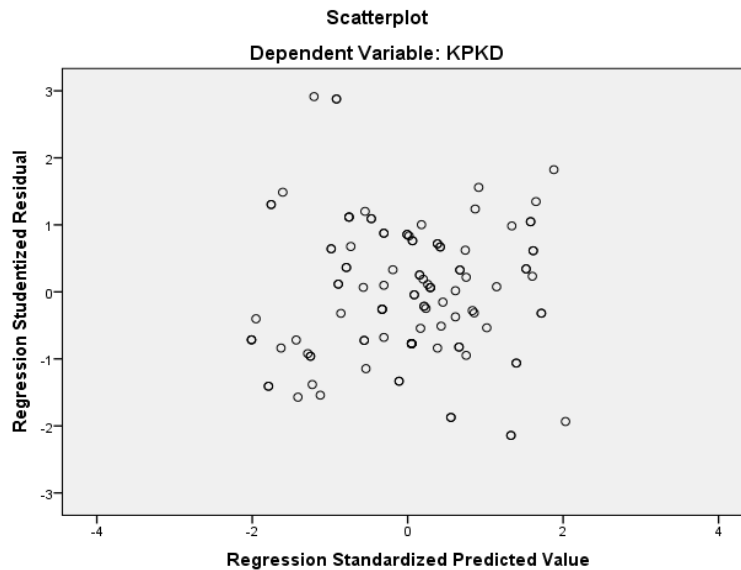
a. Dependent Variable: KPK

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan hasil uji yang ditampilkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa model regresi yang ada tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen. Karena syarat model dikatakan tidak terjadi multikolinieritas apabila nilai *tolerance* > 0,1 dan VIF < 10.

Hasil Pengujian Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dapat juga dilakukan dengan menggunakan Grafik *Scatterplot*. Uji heterokedastisitas dengan menggunakan grafik *scatterplot* dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini:



Gambar 3. Grafik Scatterplot
Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan pada grafik *scatterplot* diatas, tampak bahwa sebaran data tidak membentuk pola yang jelas dan titik-titik data menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi heteroskedisitas

Hasil Pengujian Signifikansi Parameter Individual (Uji-t Statistik)

Hasil uji-t juga merupakan hasil pengujian hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran apakah hipotesis yang diusulkan tersebut diterima ataukah ditolak. Berdasarkan usulan hipotesis penelitian yang diangkat dalam penelitian ini, hasilnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Uji T – Statistik Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1 (Constant)	9.762	2.488		3.92	.000
SAP	.34	.095	.414	3.62	.000
SPI	.18	.054	.384	3.36	.001

a. Dependent Variable: KPKD

Sumber: Data primer yang diolah

Dari hasil uji-t statistik pada tabel di atas, untuk pengujian hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah berpengaruh positif (0.34) dengan nilai probabilitas 0.000 dan jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan penerapan sistem akuntansi pemerintah terhadap kinerja pengelola keuangan pemerintah sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima.

Selanjutnya, variabel sistem pengendalian intern berpengaruh positif (0.18) dengan nilai probabilitas 0.001 serta jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka dapat

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan sistem pengendalian intern terhadap kinerja pengelola keuangan pemerintah sehingga hipotesis yang diusulkan diterima.

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependennya. Hasil perhitungan koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinansi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.766 ^a	.587	.580	2.80693

a. Predictors: (Constant), SPI, SAP

b. Dependent Variable: KPKD

Sumber: Data primer yang diolah

Hasil pengujian koefisien determinasi pada tabel diatas menunjukkan bahwa, besarnya nilai *adjusted R square* adalah sebesar 0,580 atau sekitar 58 %. Hal ini memberi arti bahwa variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabelitas variabel independen sebesar 58 %, sedangkan sisanya 42 % dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah

Hasil uji statistik menunjukkan variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah berpengaruh positif (0.344) dengan nilai probabilitas 0.000 dan jika diukur dengan derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan penerapan sistem akuntansi pemerintah terhadap kinerja pengelola keuangan pemerintah sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini di terima. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi penerapan sistem akuntansi pemerintah maka semakin baik kinerja pengelola keuangan pemerintah

Sistem akuntansi pemerintah merupakan serangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah, Dengan penerapan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan semua transaksi keuangan didukung oleh bukti transaksi dan dilakukan pencatatan secara kronologis maka laporan keuangan yang dihasilkan semakin baik sehingga dapat disimpulkan kinerja pengelola keuangan pemerintah juga semakin baik. selain itu pengelola keuangan pada setiap OPD harus membuat laporan keuangan sesuai periode akuntansi dan dilakukan secara konsisten dan periodik.

Pemerintah sebagai salah satu organisasi publik yang adalah pengguna sistem akuntansi dan sistem pengendalian kegiatan operasional selalu berpedoman pada aturan yang ditetapkan. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2019) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Juliani dan Raza (2024), Dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis kedua yang diajukan adalah pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kinerja pengelola keuangan pemerintah. Hasil uji statistik menunjukkan variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah berpengaruh positif (0.183) dengan nilai probabilitas 0.001 dan jika diukur dengan derajat signifikansi yang digunakan adalah $0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan sistem pengendalian intern terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini di terima. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pengendalian intern maka kinerja pengelolaan keuangan pemerintah semakin baik. ketika pimpinan selalu menerapkan aturan mengenai perilaku dan standar etika pegawai, pimpinan OPD secara terus menerus melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian intern maka kinerja dari pengelola keuangan pemerintah semakin baik

Pengendalian intern yaitu segala sesuatu yang meliputi semua cara-cara yang digunakan oleh pimpinan untuk mengawasi /mengendalikan organisasi yang dipimpinnya (Mulyadi 2002). Sistem pengendalian intern dalam peraturan pemerintah dilandasi pada pemikiran bahwa pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan dipengaruhi sumber daya manusia serta hanya memberikan keyakinan yang memadai. Oleh karena itu sistem pengendalian intern berfungsi sebagai pedoman penyelenggara dan tolak ukur pengujian efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

Jannah (2021) melakukan penelitian tentang pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap pengelolaan keuangan Daerah, dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Daerah. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Welly (2021), dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

SIMPULAN

Simpulan

Hasil pengujian statistik pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern terhadap kinerja pengelola keuangan pemerintah dengan menggunakan regresi berganda dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan laporan keuangan pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi penerapan sistem akuntansi pemerintah dalam pengelolaan laporan keuangan maka kinerja pengelola keuangan semakin baik. Dengan penerapan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan semua transaksi keuangan didukung oleh bukti transaksi dan dilakukan pencatatan secara kronologis maka laporan keuangan yang dihasilkan semakin baik sehingga dapat disimpulkan kinerja pengelola keuangan pemerintah juga semakin baik
2. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan laporan keuangan pemerintah. berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi sistem pengendalian intern maka semakin baik kinerja pengelola keuangan pemerintah. ketika pimpinan selalu menerapkan aturan mengenai perilaku dan standar etika pegawai, pimpinan OPD secara terus menerus melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian intern maka kinerja dari pengelola laporan keuangan pemerintah semakin baik.

Keterbatasan

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan yang diharapkan dapat diatasi pada penelitian selanjutnya, keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengguna metode penyebaran kuesioner memberikan hasil pengukuran yang kurang sensitive, karena responden cenderung mempunyai standar persepsi yang berbeda dari masing-masing responden. Pengisian daftar pernyataan oleh responden berdasarkan pada persepsi personal yang sifatnya subyektif sehingga bisa berarti lain bagi responden satu dengan responden yang

lainnya. Hal tersebut akan berbeda dengan metode wawancara yang akan menggunakan standar penelitian yang baku yang ditetapkan.

2. Penggunaan indikator-indikator pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian kurang menggambarkan keadaan secara keseluruhan. Banyak informasi maupun indikator lain yang terkait dengan variabel penelitian ini yang belum ditangkap dalam kuesioner

Implikasi

Hasil penelitian ini mempunyai beberapa implikasi kebijakan kepada Pemerintah Provinsi Maluku dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya akuntansi pemerintahan yaitu:

1. sistem pengendalian intern merupakan faktor yang sangat penting dalam peningkatan kinerja pejabat pengelola keuangan OPD, dimana sistem pengendalian intern dijadikan kontrol dan pengawasan terhadap kinerja pengelola keuangan, sehingga lembaga Pemerintah provinsi Maluku yang merupakan lembaga pengendalian intern, harus melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik, sehingga kinerja pegawai dapat ditingkatkan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Implikasi teoritis atas pengembangan ilmu pengetahuan adalah memberikan referensi tambahan bahwa dalam peningkatan kinerja pejabat pengelola keuangan pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern

Saran

Dengan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, disarankan ada penelitian selanjutnya untuk:

1. Penelitian mendatang sebaiknya melakukan penelitian dengan metode wawancara langsung dengan kelompok yang terfokus untuk mengumpulkan data penelitian agar dapat mengurangi adanya kelemahan mengenai *internal Validity*.
2. Peneliti juga menyarankan untuk peneliti selanjutnya agar memperluas objek penelitian pada OPD yang ada pada kabupaten-kabupaten lain di provinsi Maluku sehingga hasilnya dapat digeneralisasi.
3. Pada penelitian ini variabel-variabel independen yang diteliti hanya berpengaruh terhadap variabel kinerja pengelolaan keuangan pemerintah sebesar 58 %, berarti bahwa ada pengaruh sebesar 42 % dari variabel-variabel lain diluar model. Penelitian selanjutnya untuk meneliti variabel-variabel lain yang belum termasuk dalam model regresi penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rohman. (2007). Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Maksi Vol7 No.2 Agustus 2007:206-220*
- Afrida Nur. (2013). Pengaruh Desentralisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Padang). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. 24 Hal
- Anggraeni. (2008). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. *Jurnal Ekonomi Bisnis.No.1 Vol 13*.
- Dewi Andini dan Yusrawati. (2015). Pengaruh Kompetensi SDM dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akutansi I Vol. 24 No. 1 Juni 2015*.
- Fadillah, (2001). Pradigma kritis dalam studi kebijakan publik. Universitas Sun Giri
- Gade. (2000). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Univeristas Indonesia.
- Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat: Jakarta.
- Halim, Abdul. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Salemba Empat: Jakarta.

- Haryanto. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jannah Miftahul. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Medan. Skripsi Fakultas ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera utara Medan.
- Juliani Dea, Raza Hendra. (2024). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Moderating Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe. (2024) *Jurnal Akuntansi Malikusaleh*, Volume 3, No 3 September 2024
- La Midjan Azhar Susanto. (2000). *Sistem Informasi Akuntansi*. 1 Edisi keenam: Lembaga Informasi Akuntansi.
- Mahsun, Mohamad, (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Penerbit BPFE, Yogyakarta
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta
- Maryani Noni, Jurnalistiati Datik Kansha. (2025). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Di Sekertariat DPRD Provinsi Jawa Barat. *Journal Of Economic business dan accounting*, Volume 8 No 2 Tahun 2025
- Mulyadi, (2001), *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Nasution, D. A. D. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 30-43
- Nugraheni, (2008). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1 Vol. 13, April 2008*
- Simanungkalit, A.P. Anggelina. (2013). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Kota Gorontalo. *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Sugiyono, (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*. CV. Alfabeta: Bandung
- Sujana Edy. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan). *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurnal Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014)*
- Tanjung. (2009). *Akuntansi Pemerintah Daerah: Konsep dan Aplikasi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan*. Bandung; ALFABETA
- Tresnawati. (2012). Pengaruh Efektifitas Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Intansi Pemerintah Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, Universitas Widyautama, *Prosiding Seminar Nasional*
- Welly. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Wahana Ekonomi*. Volume 18, No 1, April 2021.
- Widiastuti, Ruri. (2013). Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Bandung). Skripsi 111 Halaman
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
- Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan sistem akuntansi keuangan daerah.
- Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas pemendagri No13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah RI No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.